

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Konsep

2.1.1. Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional (*National Interest*) ialah salah satu konsep yang seringkali digunakan di studi hubungan internasional yang diartikan sebagai tujuan yang ingin diraih suatu negara di bidang ekonomi, budaya maupun militer. Dari tujuan itu dijadikan pondasi bagi suatu negara agar dapat berinteraksi bersama aktor lainnya. Lebih lanjut, dalam konsep kepentingan nasional mempunyai dua prespektif lainnya yakni pertama, analisis yang digunakan dalam mengkaji preferensi politik luar negeri sebuah negara. Kedua, sebagai kriteria dalam memberikan evaluasi suatu kebijakan maupun tindakan tertentu serta dapat sebagai justifikasi kebijakan luar negeri (Anshar, 2015).

Menurut Hans J Morgenthau mendefinisikan kepentingan nasional merupakan taktik suatu negara guna dapat melindungi dan mempertahankan identitas politik dan kultur dari ancaman negara lain. Dalam meraih suatu kepentingan nasional sebuah negara harus menerapkan suatu kebijakan luar negeri yang bermanfaat untuk mengatur suatu negara agar terarah dalam melakukan hubungan internasional dengan negara lain. Kepentingan Nasional diacukan juga sebagai langkah sebuah negara dalam melihat fenomena-fenomena antar global. Selain itu, aktivitas suatu negara pula perlu mendapatkan perhatian karena setiap tindakan yang dijalankan harus melihat bagaimana kebijakan-kebijakan yang telah di tetapkan suatu negara (Morgenthau, 1978).

Adapun menurut beberapa ahli lainnya yang mempunyai pendapat berbeda dalam mengasumsikan konsep kepentingan nasional. Menurut Felix E Oppenheim mendefinisikan kepentingan nasional ialah tujuan suatu negara dalam tingkat internasional guna dapat memperoleh rasa kesejahteraan terhadap masyarakatnya. Dalam kepentingan nasional mempunyai tujuan utama dalam berbagai bidang misalnya ekonomi serta keamanan negaranya (Oppenheim, 1987).

Kepentingan Nasional memiliki dampak bagi sebuah negara dalam mengambil suatu keputusan untuk menjalin hubungan internasional karena sebagai akses sebuah negara untuk dapat melihat suatu fenomena-fenomena antar negara. Aktivitas negara dalam menjalin suatu interaksi juga butuh diperhatikan karena disetiap tindakan harus dilihat dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh suatu negara tersebut (Hakim, 2019).

2.1.2. Konsep Idiosinkratik

Konsep Idiosinkratik adalah suatu jenis analisa yang memberikan pengaruh terhadap aktor individu selama proses pengambilan keputusan kebijakan luar negerinya. Konsep Idiosinkratik biasa dimaknai sebagai ciri khas yang tertanam dalam diri seorang pemimpin dalam menentukan kebijakan luar negeri. Konsep Idiosinkratik sering digunakan dalam tingkat analisa yang paling dasar karena bagaimana cara sistem internasional, negara dan masyarakat terbentuk tidak lepas dengan level individu yang menyusunnya. Secara umum, Idiosinkratik merupakan aspek yang dimiliki oleh pembuat keputusan. Adapun variabel dalam idiosinkratik tersebut seperti bakat, nilai dan pengalaman sebelumnya yang dapat membedakan dengan para pembuat keputusan lainnya (Tania Dwi, 2020).

Adapun indikator yang akan digunakan penulis dalam menganalisa permasalahan yang akan dikaji yaitu berdasarkan model dari Alex Mintz, dalam buku yang berjudul “*Understanding Foreign Policy Decision Making*” karya Alex Mintz dan Karl DeRouen Jr. tahun 2010, Alex Mintz menjelaskan terdapat 3 elemen penting dalam model analisa Idiosinkratik, antara lain:

a. Kepribadian Pemimpin (*Leader’s Personality*)

David Winter (2003, 110) memberikan definisi bahwa kepribadian seseorang adalah “integrasi proses pemodelan individu dari persepsi, ingatan, penilaian, pencarian tujuan, ekspresi emosi dan regulasi”. Kepribadian terbentuk ketika mereka memproses emosinya. Menurut Winter (2003, 115-117), ada 4 unsur penting dari kepribadian seseorang, yaitu: temperamen, kognisi, motivasi dan latar belakang sosial. Sementara latar belakang sosial mengacu pada unsur-unsur perilaku yang tidak selalu terlihat, seperti jenis kelamin, kelas, ras, budaya, suku, dan generasi, temperamen mengacu pada hal tersebut. Temukan semua elemen yang memengaruhi keyakinan, nilai, dan tindakan. Komponen terakhir, motivasi, terdiri dari tujuan yang harus dicapai dan tindakan perlindungan.

b. Gaya Kepemimpinan (*Leadership Style*)

Alex Mintz mengkategorikan gaya kepemimpinan menjadi tiga jenis: Pertama, *Goal-driven vs Context-driven*, seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang bersifat goal-driven yakni lebih menantang kendala-kendala yang akan dihadapinya dalam membuat keputusan kebijakan luar negeri. Gaya kepemimpinan yang bersifat goal-driven biasanya tidak terbuka tentang informasi

terbaru. Sedangkan, gaya kepemimpinan yang bersifat context-driven mengarah untuk menemukan informasi terbaru.

Kedua, *Task-oriented vs Task-motivated*, seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang bersifat task-oriented tidak merubah ideologinya. Sementara, gaya kepemimpinan yang bersifat task-motivated cenderung tidak memerlukan aliansi internasional atau domestik yang luas sebelum melakukan tindakan dan dalam mempertahankan kebijakan.

Ketiga, *Task-oriented vs Context-Oriented* memiliki perbedaan yang dianggap penting yakni kapasitas sensitivitas terhadap konteks politik. Pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan *task-oriented* sangat tidak terlalu sensitif ketika berkaitan dengan konteks politik, namun pemimpin *context-oriented* sebaliknya. Untuk melihat dan menganalisa apakah seorang pemimpin mempunyai gaya kepemimpinan yang bersifat *task-oriented* ataupun *context-oriented*, dapat diamati dari 3 aspek: Pertama, apakah pemimpin menerima kendala politik. Kedua, bagaimana kemauan atau ambisi dari seorang pemimpin dalam memperoleh informasi terbaru. Ketiga, apakah pemimpin memfokuskan pada aspek masalah atau hubungan.

c. Tipe-tipe Pemimpin: Incremental, Karismatik, Strategic dan Pragmatic

- *Incremental*

Pemimpin yang terbuka terhadap informasi, sehingga aspek strategis dan motivasi fokus pada manuver.

- Karismatik (*Charismatic*)

Adalah seseorang pemimpin yang menginginkan hubungan dan tantangan, terbuka terhadap informasi dan strategi, namun terkait motivasi, berfokus terhadap interaksi dengan mendorong orang lain untuk mengambil tindakan.

- Strategis (*Strategic*)

Seorang pemimpin strategis adalah seseorang yang tidak takut untuk melampaui batas, sambil tetap mau belajar hal-hal baru. Pemimpin seperti itu memiliki tujuan yang jelas dan secara aktif mencari pengetahuan yang diperlukan untuk mewujudkannya. Terlepas dari keberanian dan pengendalian dirinya, dia mendekati politik dengan hati-hati.

- Pragmatis (*Pragmatic*)

Seorang pemimpin yang memahami kesulitan situasi politik tetapi tertutup kepada ide dan informasi. Tipe Pragmatic dikelompokkan menjadi 4 jenis lagi antara lain:

- a. Direktif dan Konsultatif (*Directive dan Consultative*), dua tipe ini lebih menghargai batasan politik tetapi tertutup pada informasi yang diperoleh. Aktor-aktor ini berfokus terhadap diskusi kebijakan dengan menggunakan cara pandang pribadi mereka sendiri. Adapun ciri khas dari jenis pemimpin Direktif yaitu memfokuskan terhadap masalah ketika memperoleh tantangan politik. Sedangkan, ciri khas pemimpin konsultatif yaitu lebih memfokuskan dirinya terhadap hubungan dan oleh sebab itu, para pemimpin ini akan berhati-hati dalam mengamati situasi kelompok elit lainnya.

b. Reaktif dan Akomodatif (*Reactive and Accommodative*), adapun kesamaan dari dua jenis pemimpin ini yakni memiliki kesamaan dalam terbuka menerima informasi atau ide-ide baru. Sedangkan perbedaannya terletak dari segi motivasi mereka dalam mengambil tindakan. Pertama, pemimpin bersifat reaktif termotivasi untuk memfokuskan terhadap masalah yang sedang terjadi dan bersifat bijaksana dalam mengambil keputusan kebijakan luar negerinya. Kedua, pemimpin bersifat akomodatif cenderung memfokuskan terhadap bagaimana menjalin interaksi atau kerjasama dengan negara lainnya secara baik. Tipe pemimpin akomodatif ini lebih berusaha untuk mewujudkan kompromi.

Umumnya, terdapat 5 komponen utama untuk menganalisis seorang pemimpin yang tercantum dalam konsep idiosinkratik, yang mana sangat mempengaruhi berbagai keputusan kebijakan luar negeri yang dipilih individu, adapun 5 komponen tersebut yakni:

- Kepribadian (*Personality*)

Bagaimana orientasi atau pandangan seorang pemimpin terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Kepribadian positif memiliki ego yang cukup kuat untuk menikmati atau paling tidak menerima lingkungan politik yang diperdebatkan. Namun sebaliknya, kepribadian negatif cenderung merasa terbebani, bahkan disalahgunakan, oleh kritik politik. Kepribadian seorang individu juga dapat dibangun dari beberapa faktor, seperti: faktor sosial dan lingkungan.

- Kesehatan Mental dan Fisik (*Physical and Mental Health*)

Kesehatan fisik dan mental dari pemimpin merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pengambilan keputusan karena terkadang seorang pemimpin juga mengalami psikologis.

- Ego/kepribadian dan Ambisi (*Ego/Personality and Ambition*)

Ego dan ambisi yang dimiliki dari seorang pemimpin dapat memberikan pengaruh dalam menentukan atau mengambil keputusan kebijakan yang akan dipilihnya. Dalam hal ini, dapat dilihat ketika mengambil keputusan atau menentukan kebijakan yang akan dipilih, apakah pemimpin tersebut lebih mementingkan ego dan ambisinya atau tidak, selama memperoleh sebuah tujuan dari kebijakan yang nantinya akan dipilih.

- Pengalaman-pengalaman Pribadi dan Sejarah Politik (*Political History and Personal Experiences*)

Dalam melakukan proses pengambilan keputusan juga dipengaruhi dari pengalaman pribadi pemimpin dan biografi politik yang dimiliki dari seorang pemimpin juga dapat membangun bagaimana cara pandang pemimpin dalam berpikir untuk mengambil keputusan terbaik yang akan dipilihnya.

- Persepsi dan Realitas Operasional (*Perceptions and Operational Reality*)

Dalam komponen kelima ini mendeskripsikan terkait bagaimana cara pandang dari seorang pemimpin dalam melihat suatu permasalahan yang sedang terjadi. Jenis pemimpin ini lebih bersifat persepsi, apakah cara pandang mereka akurat atau tidak.

2.2. Teori Decision Making

Salah satu tokoh terkenal terkait perkembangan studi *Decision-Making* ialah Graham T. Allinson. Dalam buku yang berjudul *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis dan Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis* memaparkan bahwa terdapat tiga jenis konseptual dalam pengambilan keputusan. Berikut ini tabel perbandingan ketiga konseptual tersebut (Allison, 1969:689-718).

Tabel 2.1.
Model Decision Making Graham T.Allinson

	Model		
	Aktor Rasional	Proses Organisasi	Politik Birokratik
Paradigma	<ul style="list-style-type: none"> - Dilandasi oleh tujuan dan sasaran - Terdapat Alternatif - Konsekuensi dari tiap –tiap alternatif - Menentukan alternatif yang dianggap relevan 	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan ditetapkan oleh organisasi - Melalui mekanisme <i>standard operating procedure</i> organisasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Tiap aktor mempunyai kepentingan dan tujuannya masing-masing - Melibatkan power dan posisi masing-masing

<p>Unit Analisis Dasar Keputusan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aksi pemerintah merupakan alternatif terbaik 	<ul style="list-style-type: none"> - Aksi pemerintah sebagai proses hasil dari output organisasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Aksi pemerintah sebagai proses politik melalui kompromi, negosiasi dan lainnya
<p>Pengorganisasian Konsep</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aktor rasional - Permasalahan - Sasaran dan tujuan - Pilihan-pilihan atau alternatif - Pemilihan alternatif yang relevan - Konsekuensi 	<ul style="list-style-type: none"> - Aktor organisasi sebagai representasi pemerintah - Unsur permasalahan - Prioritas - Aksi sebagai proses <i>ouput</i> dari organisasi - Pengendalian terpusat dan koordinasi - Keputusan berdasarkan oleh 	<ul style="list-style-type: none"> - Para aktor berada di posisi masing-masing - Prioritas - Terdapat tujuan dan kepentingan - Kekuasaan - Aksi sebagai proses politik

		pemimpin pemerintahan	
Pola Kesimpulan yang dominan	- Aksi dari pemerintah dipilih berdasarkan sasaran dan tujuannya	- Aksi dari pemerintah merupakan output organisasi yang ditentukan dengan berlandaskan SOP serta program-program organisasi	- Aksi dari pemerintah merupakan akibat dari hasil proses politik tiap aktor yang terlibat

Sumber: Data diolah dari penulis berdasarkan kutipan Graham T. Allison melalui buku yang berjudul “*Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis*” (2023).

Secara umum, menurut Graham T. Allison menyatakan dalam proses pengambilan keputusan terdapat tiga model utama yaitu model aktor rasional, model proses organisasi dan model politik birokratik seperti gambar tabel yang telah disajikan di atas. Pertama, dalam model aktor rasional diasumsikan sebagai suatu aksi yang dilakukan dengan berdasarkan alternatif rasional yang bertujuan untuk memperoleh keputusan yang sesuai. Kedua, dalam model proses organisasi menilai bahwa organisasi merupakan suatu instrumen penting yang dapat menentukan proses dari pengambilan keputusan tersebut. Hal tersebut karena instrumen organisasi mempunyai mekanisme struktur kerja yang relevan dan beprosedur SOP (*Standard operating procedure*). Sehingga, keputusan yang ditetapkan dapat akurat sebagai hasil dari pertimbangan serta interaksi yang

dilakukan oleh organisasi dengan mempertimbangkan tujuan, sasaran dan skala prioritasnya. Terakhir, dalam model politik birokratik yang memandang keputusan merupakan proses dari negosiasi antar berbagai pihak dalam pemerintahan nasional. Berbagai aktor atau kelompok yang mempunyai kepentingan akan saling mempengaruhi, berinteraksi dan dipengaruhi dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Hasil akhir yang diperoleh merupakan sebuah kebijakan dari berbagai pertimbangan yang panjang dan kompleks (Allison, 1969:689-718).

Adapun ahli lain yang turut menganalisa karakteristik dalam proses pengambilan keputusan yakni Richard Snyder, dkk. Menurut Richard Snyder, dkk menyatakan bahwa dalam proses pengambilan keputusan terdapat beberapa faktor dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Pertama, *setting* internal yang terdiri dari lingkungan non-manusia, masyarakat, dan lingkungan manusia yang terdiri dari populasi dan budaya. Pengaturan internal, berjalan seiring dengan sikap dan struktur sosial yang tersusun dari nilai dan berbagai proses sosial. Kemudian, pada kedudukan yang sama dengan pengaturan internal, terdapat juga *setting* eksternal yang terdiri dari lingkungan non-manusia, masyarakat dan budaya lain, serta aksi pemerintah negara lainnya. Kedua pengaturan tersebut berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain, dengan tujuan agar pengambilan keputusan dapat menyeimbangkan kedua faktor tersebut untuk merumuskan keputusan yang tepat (Snyder, dkk.2002, 64).

Namun, dalam penelitian ini menggunakan teori pengambilan keputusan menurut William D. Coplin yang memandang bahwa dalam merumuskan pengambilan keputusan terdapat tiga operasional penentu yang melandaskan kepala

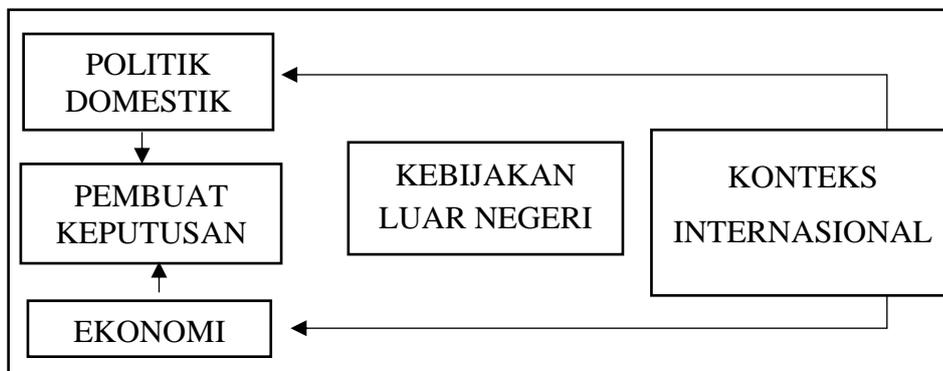
negara yang mewakili pemerintahannya dalam proses pengambilan keputusan. Adapun tiga operasional tersebut seperti kondisi politik domestik, ekonomi serta konteks internasional.

Penulis menggunakan teori William D. Coplin dikarenakan relevan dengan kondisi yang terjadi di negara Venezuela terkait masalah hiperinflasi. Dalam hal ini, presiden Nicholas Maduro dipandang sebagai aktor yang membentuk kebijakan berdasarkan tiga faktor tersebut yang bertujuan untuk melindungi keamanan nasional dari ancaman pihak eksternal dan melindungi identitas negaranya. Lebih lanjutnya, teori decision-making menurut William D.Coplin akan dipaparkan secara detail dalam subbab selanjutnya.

2.2.1. Teori Decision-Making Menurut William D.Coplin

Menurut William D. Coplin dalam merumuskan pengambilan keputusan terdapat tiga operasional penentu yang melandaskan kepala negara yang mewakili pemerintahannya dalam proses pengambilan keputusan. Adapun tiga operasional tersebut seperti kondisi politik domestik, ekonomi serta konteks internasional. Adapun bagan yang memperlihatkan proses pengambilan keputusan dalam buku Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis (Coplin, 2003).

Bagan 2.1
Proses Pengambilan Keputusan Menurut William D. Coplin



Sumber: Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis (Coplin, 2003).

Berdasarkan gambar bagan tersebut terlihat faktor-faktor di atas saling berkaitan satu sama lainnya dan menjadi pertimbangan utama dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara. Berdasarkan bagan tersebut, kondisi politik dalam negeri serta kondisi ekonomi merupakan faktor internal yang mempengaruhi pemerintah dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Faktor selanjutnya adalah konteks internasional yang merupakan sesuatu yang terjadi di luar negeri dan tidak dapat dikendalikan oleh suatu negara. Konteks internasional menjadi faktor yang penting dalam pembuatan keputusan karena adanya interaksi antara pemerintah nasional dengan pihak eksternal dalam berbagai hal. Oleh sebab itu, konteks internasional kemudian mempengaruhi kondisi politik domestik serta kondisi ekonomi suatu negara. Berikut penjabaran dari ketiga faktor yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara sebagaimana yang dikemukakan oleh Coplin (2003).

1. Politik Domestik

Dalam pandangan Coplin, kebijakan luar negeri adalah suatu penggambaran dari kondisi politik domestik di suatu negara. Artinya, kebijakan luar negeri yang dirumuskan oleh pengambil keputusan ialah dipengaruhi oleh sistem politik negara tersebut. Politik Domestik meliputi faktor budaya yang didalamnya mengandung perilaku masyarakat dan realitas situasi politik yang sedang terjadi. Para pengambil keputusan akan bertindak mewakili negaranya dalam proses perumusan strategi, perumusan kebijakan luar negeri, maupun evaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan yang akan mempertimbangkan kepentingan nasional (Coplin, 2003:73-108).

2. Ekonomi

Selain politik domestik, dalam pengambilan keputusan juga harus mempertimbangkan kondisi ekonomi. Coplin (2003) berpendapat dalam bukunya menyatakan bahwa kondisi ekonomi suatu negara memainkan peran penting dalam kebijakan luar negerinya. Keadaan ekonomi yang dibahas meliputi kesejahteraan negara, pertumbuhan ekonomi, dan bagaimana suatu negara dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya. Negara selalu menjadikan faktor geografis sebagai pertimbangan utama dalam sistem pertahanan keamanan nasional. Kondisi ekonomi merupakan penentu kebijakan luar negeri karena mencerminkan kekuatan material suatu negara (Coplin, 2003:110-130).

3. Konteks Internasional

Konteks internasional adalah suatu hal yang terjadi di luar negeri maupun di luar kendali negara. Konteks internasional adalah hasil dari kebijakan luar negeri

seluruh negara di masa lalu, sekarang, serta tindakan yang diambil untuk mengantisipasi kemungkinan kejadian di masa depan. Menurut Coplin (2003, 165), menyatakan bahwa sifat sistem internasional dan sikap negara dalam lingkup eksternal dapat menentukan perilaku atau tanggapan negara terhadap permasalahan internasional. Menurut Coplin, konteks internasional merupakan rangkaian faktor yang mempengaruhi kegiatan politik luar negeri suatu negara karena mengandung tiga faktor penting, yaitu geografi, ekonomi dan politik (Coplin, 2003:167). Penelitian ini melihat elemen dari konteks internasional yang bersifat ekonomis yang berfokus pada permasalahan hiperinflasi terkait dalam upaya presiden Nicholas Maduro dalam mengatasi hiperinflasi di Venezuela.

Peranan geografis dalam penentuan arah kebijakan luar negeri dinilai masih penting. Hal tersebut mengingat kedekatan geografis salah satunya dapat berkaitan dengan keanggotaan bersama dalam organisasi regional, multilateral, maupun bilateral. Selanjutnya, hubungan politik antar negara satu dengan negara-negara lainnya. Hubungan itu tentunya dapat memberikan pengaruh bagi kebijakan luar negeri sebab suatu negara perlu mendapat pengakuan dan dukungan dari pihak eksternal terkait keberadaannya dalam suatu sistem. Meskipun demikian, bentuk tanggapan internasional terhadap sikap kebijakan luar negeri suatu negara justru dapat mendatangkan pandangan negatif dari sistem internasional. Keterkaitan antara konteks internasional dengan politik domestik serta kondisi ekonomi membantu peneliti dalam memahami keputusan negara dalam membuat kebijakan luar negeri (Coplin, 2003:167-168).

Penulis menggunakan teori pengambilan keputusan dari William D. Coplin untuk menjelaskan bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Presiden Nicholas Maduro terkait mengatasi permasalahan hiperinflasi. Pada penelitian ini, presiden Nicholas Maduro dinilai sebagai aktor dalam penentu pengambilan keputusan kebijakan untuk menangani permasalahan hiperinflasi di negaranya dengan tiga faktor yang menjadi pertimbangan yakni situasi politik domestik, ekonomi dan konteks internasional.

2.3. Penelitian Yang Relevan

Penelitian terdahulu akan mendukung serta membantu penelitian penulis dalam penelitian terdahulu akan mengindetifikasi persamaan dan perbedaannya. Dalam penelitian ini akan berfokus pada upaya presiden Nicholas Maduro dalam mengatasi hiperinflasi di Venezuela. Adapun beberapa rujukan penelitian yang sebelumnya.

Pertama penelitian yang berjudul “Strategi WFP Dan CELAC Dalam Menangani Krisis Ketahanan Pangan Di Venezuela Tahun 2014-2020 dalam skripsi S1 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang di tulis oleh Febiola Gumay. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana peran dari organisasi internasional dalam upaya menangani krisis ketahanan pangan. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian kami yakni sama-sama meneliti mengenai krisis ekonomi di Venezuela. Dalam penelitian ini, kami menjelaskan mengenai bagaimana proses permasalahan dan ketidakstabilan krisis ekonomi yang telah mengancam stabilitas warga negara Venezuela. Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya ialah penelitian sebelumnya lebih memfokuskan kepada gambaran data dan fakta

bagaimana strategi kedua peran organisasi internasional dalam menyikapi permasalahan krisis ketahanan pangan di Venezuela. Sedangkan pada penelitian ini, penulis lebih memfokuskan kepada upaya presiden Nicholas Maduro dalam mengatasi hiperinflasi dan tidak berpacu kepada peran organisasi internasional.

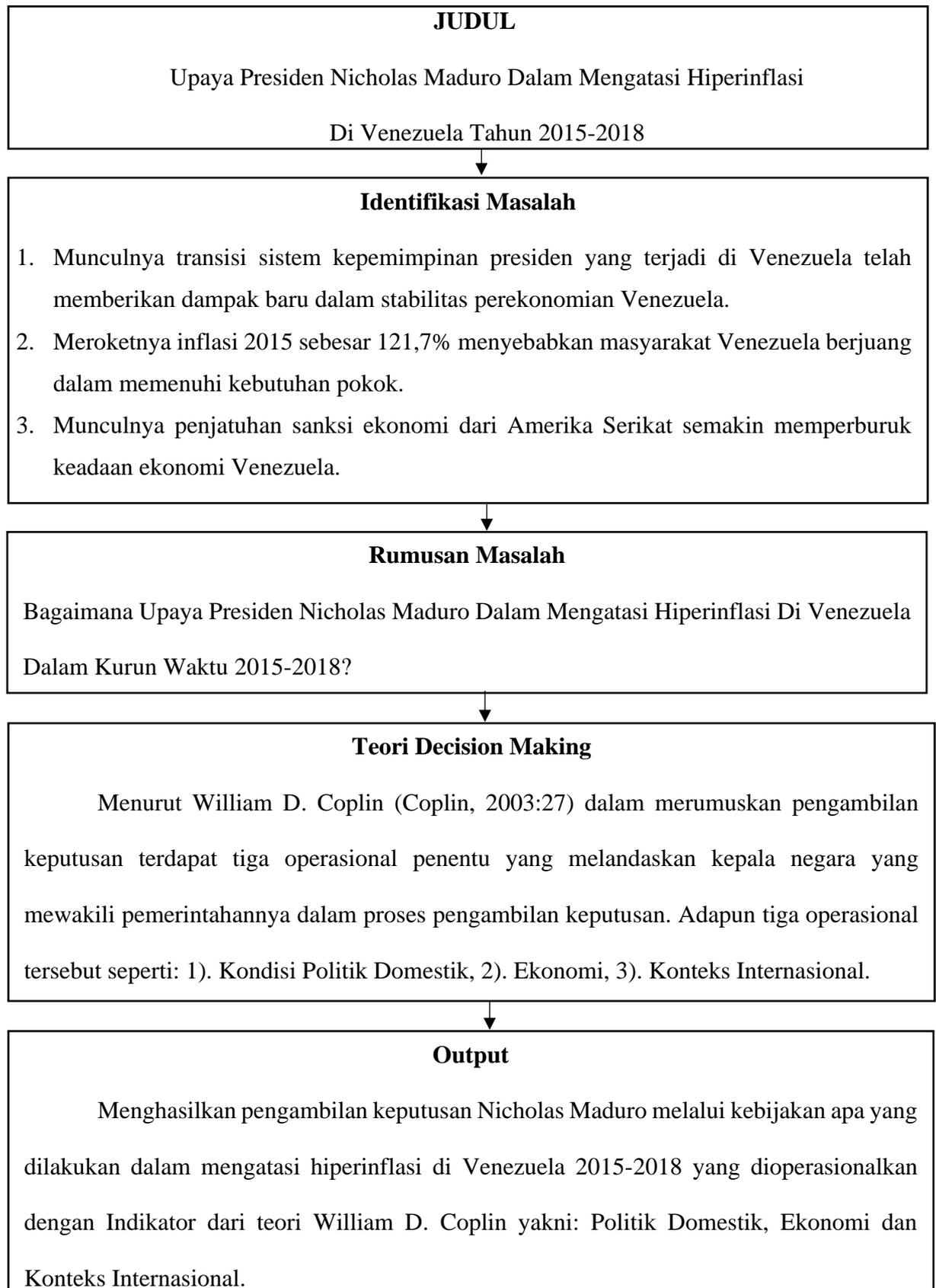
Kedua terdapat juga penelitian yang dibuat oleh Poltak Partogi Nainggolan pada tahun 2018 lalu yang berjudul “Krisis Venezuela dan Migrasi Internasional”. Pada penelitian tersebut, Poltak membahas mengenai bagaimana dampak migrasi yang dilakukan warga negara Venezuela. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yakni dilihat dari lokasi penelitiannya yakni negara Venezuela. Adapun letak kajian perbedaannya yakni dilihat dari variabelnya. Penelitian sebelumnya lebih menjelaskan permasalahan dampak migrasi penduduk Venezuela ke negara tetangganya. Sedangkan, penelitian ini yakni berfokus menjelaskan bagaimana usaha Nicholas Maduro dalam mengatasi dampak hiperinflasi tersebut.

Ketiga, penelitian yang berjudul “*Populism, 21 st-century socialism and corruption in Venezuela*” yang dibuat oleh Margarita Lopez Maya. Dalam penelitian Margarita Lopez Maya menjelaskan ideologi populis negara Venezuela. Adapun persamaan dalam penelitiannya. Jika dilihat dari penelitian sebelumnya yakni membahas bagaimana ideologi populis yang diterapkan Hugo Chavez hingga Nicholas Maduro yang otoritarian menyebabkan krisis ekonomi berdampak krisis politik ditandai dengan ketidakpercayaan warga terhadap pemerintah Venezuela akibat intervensi asing. Sedangkan dalam penelitian ini pula memperlihatkan bagaimana bahayanya rayuan populis dari seseorang pemimpin karismatik, yang berkuasa dapat mengikis semua mekanisme akuntabilitas institusional dan

menghancurkan demokrasi dari dalam. Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu lebih memaparkan terkait krisis politik pada awal kepemimpinan presiden Nicholas Maduro sampai akhir 2014. Perbedaan lainnya terletak di waktu penelitian. Sedangkan perbedaan penelitian ini yakni lebih menggambarkan hiperinflasi dan politik Venezuela tahun 2015-2018 serta upaya presiden Nicholas Maduro dalam mengatasi hiperinflasi tersebut.

Keempat, terdapat juga penelitian yang dibuat oleh Selvi Adrianti pada tahun 2020 lalu yang berjudul "*Kebijakan Presiden Nicholas Maduro Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Di Venezuela*". Pada penelitian tersebut, Selvi Adrianti membahas mengenai bagaimana kebijakan Presiden Nicholas Maduro dalam krisis ekonomi di Venezuela. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas permasalahan krisis ekonomi. Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya terletak pada bagian cakupan tahunnya. Sedangkan, penelitian ini yakni berfokus pada tahun 2015-2018. Selain itu, perbedaan penelitian ini juga yakni terletak dibagian penggunaan konsep dan teori, penelitian sebelumnya menggunakan konsep kebijakan ekonomi sosial demokrasi dan teori populisme. Sedangkan, penelitian ini yakni menggunakan konsep kepentingan nasional dan Idiosinkratik serta teori pengambilan keputusan untuk menjelaskan lebih detail mengenai fenomena yang akan dibahas.

2.4. Alur Pikir Penelitian



Sumber: Data diolah oleh Penulis, 2023

2.5. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana kondisi politik domestik yang menyebabkan Venezuela mengalami hiperinflasi pada masa Presiden Nicholas Maduro?
2. Bagaimana kebijakan ekonomi Nicholas Maduro dalam mengatasi hiperinflasi di Venezuela?
3. Bagaimana konteks internasional dalam mempengaruhi situasi hiperinflasi di Venezuela?